



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 1, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 01/01/2025
 Reviewed : 02/01/2025
 Accepted : 01/01/2025
 Published : 07/01/2025

S Endang Prasetyawati¹
 Risti Dwi Ramasari²
 Amanda Putri Evandra³

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN DATA DIRI PADA KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 176/PDT.P/2024/PN TJK)

Abstrak

Perubahan data diri diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan isu penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Tjk terkait permohonan perubahan nama oleh Berlianto Sutianto. Pemohon wajib meninjau dokumen pendukung asli yang akan dibedakan oleh Dukcapil pada saat proses perubahan data. Jika permohonan ditolak, pemohon berhak mengajukan banding ke pengadilan, di mana hakim akan menyeimbangkan bukti dan dalil yang diajukan. Dalam hal ini, tindakan hakim mempunyai dampak yang signifikan terhadap situasi hukum dan dapat mempengaruhi akses mereka terhadap berbagai pelayanan publik. Studi ini juga mengkaji implikasi sosial dari perubahan data pribadi, seperti potensi stigma dan dampak terhadap identitas individu. Selain itu, transparansi sangat penting dalam proses administrasi kependudukan karena dapat mencegah korupsi dan memberikan kewenangan untuk menggunakannya. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap isi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti otentik, kesaksian, dan regulasi terkait dalam memutuskan permohonan perubahan data diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam memberikan izin perubahan data diri, yang berkontribusi pada akurasi identitas warga negara.

Kata Kunci: Perubahan Data Diri, KTP, KK, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pertimbangan Hakim.

Abstract

Changes to personal data are regulated by (Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration), which has been amended by Law Number 24 of 2013. Resident Identity Cards (KTP) and Family Cards (KK) are important issues in population administration in Indonesia. This research aims to analyze the judge's considerations in decision Number 176/Pdt.P/2024/PN Tjk regarding Berlianto Sutianto's request for a name change. Applicants are required to review the original supporting documents which will be distinguished by Dukcapil during the data change process. If the application is rejected, the application has the right to appeal to court, where the judge will balance the evidence and arguments presented. In this case, the judge's actions have a significant impact on the legal situation and can affect their access to various public services. This study also examines the social impact of changing personal data, such as potential stigma and impact on individual identity. In addition, transparency is very important in the population administration process because it can prevent corruption and provide authority to use it. The method used is qualitative analysis of the contents of court settlements. The research results show that judges consider authentic evidence, testimony, and related regulations in deciding on requests to change personal data. The conclusion of this research is that judges have a

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
 email : s.endang@ubl.ac.id

strong legal basis in granting permission to change personal data, which contributes to the accuracy of citizens' identities.

Keywords: Changes In Personal Data, KTP, KK, Population And Civil Registration Service, Judge's Consideration.

PENDAHULUAN

Perubahan data dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), merupakan aspek penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia. KTP dan KK berfungsi sebagai identitas asli yang digunakan dalam berbagai transaksi administrasi dan sosial. Oleh karena itu, keakuratan data yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut di atas sangat penting untuk mengidentifikasi permasalahan di kemudian hari.

Di Indonesia, proses perubahan data tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil); hal ini juga memerlukan masukan dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan data yang dilakukan mempunyai implikasi hukum yang signifikan, sehingga diperlukan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa perubahan tersebut jujur dan sesuai dengan fakta sebenarnya.

Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah kasus Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Tjk, dimana seorang pemohon bernama Berlianto Sutianto meminta perubahan nama. Permohonan ini merupakan akibat kesalahan penulisan nama pada KTP dan KK yang tidak sesuai dengan dokumen resmi lainnya, seperti kelahiran dan akta paspor.

Dalam konteks hukum, segala perubahan data harus mempunyai dasar yang kuat, baik dari bukti strategi maupun dalil hukum. Pengadilan mempunyai peran penting dalam memberikan langkah-langkah yang diperlukan agar Dukcapil dapat melakukan perubahan data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan bukan sekedar kelompok yang mengadvokasi hak-hak masyarakat, namun juga merupakan lembaga yang menjamin ketaatan masyarakat terhadap hukum dan supremasi hukum.

Perubahan data pribadi ditentukan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan dalam konteks hukum. Salah satu undang-undang yang mengatur hal ini adalah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah digantikan dengan UU No. 24 Tahun 2013. UU ini mencakup berbagai topik terkait administrasi kependudukan, seperti proses penyelesaian tugas, verifikasi identitas, dan sensor dokumen.

Pasal 62 UU tersebut menguraikan tanggung jawab individu untuk memperbarui data pribadinya, sedangkan Pasal 63 menguraikan kewajiban Dukcapil untuk melakukan verifikasi dan penelaahan dokumen sesuai dengan data yang diungkapkan sebelumnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Data Kependudukan memberikan informasi lebih rinci mengenai prosedur yang harus diikuti dalam melakukan evaluasi perubahan data.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan data adalah adanya perubahan status hukum, seperti pernikahan atau perceraian, yang seringkali memerlukan pemutakhiran data dalam dokumen kependudukan. Selain itu, kesalahan penulisan yang terjadi pada awal pendaftaran juga merupakan salah satu alasan umum terjadinya perubahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat umum untuk memahami prosedur dan pedoman yang diperlukan dalam melakukan perubahan data pribadi.

Sebagaimana tercantum dalam Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Tjk, hakim mempertimbangkan berbagai bukti, termasuk dokumen resmi dan kesaksian yang ditentukan oleh pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempunyai keinginan yang kuat untuk menentukan permohonan keabsahan yang dibicarakan dan memastikan bahwa keputusan yang dibicarakan tidak hanya berdasarkan formalitas tetapi juga substansi yang bermakna.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan hakim pada putusan tersebut di atas serta faktor-faktor yang mengindikasikan terjadinya perubahan data KTP dan KK. Melalui pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan di bidang administrasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keakuratan data.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis perubahan hakim dalam dokumen Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Tjk tentang perubahan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Sumber data berasal dari dokumen-dokumen yang diakses melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta literatur terkait seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang tata cara administrasi kependudukan dan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan analisis dokumen, dimana informasi dikategorikan menurut tema dan diinterpretasikan untuk memahami hakim makna. Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari dokumen yang diterbitkan dengan literatur lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Data Diri Pada Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 176/Pdt.P/2024/PN TJK

Naskah Data diri merupakan elemen vital yang penting bagi perlindungan dan pengembangan kesehatan individu. Dalam konteks legal standing suatu negara, data yang akurat dan terkini, seperti yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), merupakan aspek fundamental dari identitas nasional. Dokumen identitas ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana verifikasi identitas tetapi juga sebagai sarana untuk mengakses berbagai layanan publik dan memperoleh hak-hak hukum, seperti yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Tanpa data pribadi yang benar, individu mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan identitasnya, yang dapat berdampak negatif pada kedudukan hukumnya.

Data yang akurat memungkinkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang tepat dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang menjadi korban. Mengingat hal ini, penting untuk diingat bahwa informasi pribadi tidak hanya terkait dengan verifikasi identitas tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan persyaratan hukum dan mencegah penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan data yang efektif merupakan langkah penting dalam melindungi individu, terutama mereka yang rentan, dalam masyarakat.

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, keakuratan data sangatlah penting. Identifikasi yang jelas melalui data korban dan peran pelaku sebagai kunci dalam proses hukum, yang pada akhirnya menjamin lingkungan yang aman bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data diri yang baik tidak hanya meningkatkan keadilan tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan seksual, sehingga menjadikan data diri penting untuk memperluas status hukum dan sosial.

Pendataan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seringkali menjadi langkah penting bagi warga negara. Salah satu faktor utama perubahan ini adalah kesalahan penamaan yang terjadi pada saat awal pendaftaran. Permasalahan ini dapat timbul karena berbagai sebab, seperti informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Dukcapil) atau ketidaktepatan petugas pendaftaran. Ketidaktepatan ini berpotensi menimbulkan persoalan serius, penyebutan nama-nama yang dapat berdampak negatif terhadap pelayanan publik dan hak hukum individu.

Selain kesalahan penulisan, perubahan status hukum juga menjadi pedoman umum dalam penyesuaian data pribadi. Misalnya, ketika seseorang sakit atau bercerai, mereka sering mengecek data KTP dan KK untuk mengetahui statusnya saat ini. Ini tidak hanya mencakup nama tetapi juga alamat, nama pasangan, dan informasi grup lainnya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang terkandung dalam dokumen akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan saat ini.

Dari segi ekonomi, data diri juga mempunyai dampak yang signifikan. Di tempat kerja, misalnya, bisnis biasanya memerlukan informasi identitas karyawan untuk tujuan administratif dan pelaporan. Data yang tidak dapat diandalkan dapat menghambat proses pembuatan kontrak, menghambat kemampuan memperoleh kredit, dan menghambat kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, data yang akurat juga penting dalam pelaporan perpajakan, dimana identitas yang dapat diandalkan menjamin terpenuhinya persyaratan perpajakan. Oleh karena itu, data yang jelas merupakan prasyarat untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian.

Dalam konteks transaksi tanah, keakuratan dan kejelasan data sangat penting untuk memastikan legalitas dan pengalihan hak. Data yang tidak akurat dapat menimbulkan permasalahan hukum dan perselisihan antar pihak yang bertransaksi, sehingga berpotensi merugikan semua pihak. Oleh karena itu, pemahaman fakta dalam konteks tanah hukum sangat penting untuk membangun stabilitas hukum dan stabilitas perekonomian.

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi temuan ini adalah adanya perubahan identitas gender. Setelah beberapa tahun, isu identitas gender menjadi semakin umum, dan orang-orang yang menjalani transisi gender seringkali perlu memberikan informasi pribadi mereka untuk menentukan identitas baru mereka. Hal ini merupakan tantangan mendasar sistem kependudukan administrasi yang harus disesuaikan.

Kesalahan dalam registrasi awal juga dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran secara menyeluruh. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya memastikan bahwa semua informasi yang diberikan akurat dan komprehensif. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas, edukasi mengenai kependudukan administrasi sangatlah penting. Masyarakat akan lebih perhatian dalam memberikan informasi dan menganalisis permasalahan data pada hari yang akan datang jika mereka lebih memahami proses pendaftaran dan konsekuensinya.

Dalam konteks Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Tjk, pemohon mengalami kesulitan akibat adanya permasalahan penamaan pada KTP dan KK yang tidak sesuai dengan dokumen resmi lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi sudah ada, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang memungkinkan terjadinya permasalahan. Oleh karena itu, harus ada audit dan evaluasi berkala terhadap sistem pendaftaran untuk memastikan tidak timbul masalah.

Demografi juga dapat mempengaruhi perubahan data itu sendiri. Misalnya, migrasi antar negara atau ke negara lain sering kali memerlukan pengumpulan statistik tentang migrasi. Apabila seseorang dalam keadaan tinggal, hendaknya mengirimkan alamat ke KTP dan KK. Proses ini sering kali dilakukan oleh individu yang tidak menyadari perlunya menganalisis data mereka sendiri, yang dapat membantu mengatasi masalah administratif di kemudian hari.

Di era digital, data individu tidak hanya berfungsi sebagai identitas tetapi juga sebagai komponen penting dalam melindungi kesehatan manusia dan swasta. Artikel ini membahas tantangan yang muncul ketika menganalisis data pribadi, yang merupakan aspek penting untuk

memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa takut akan pencurian identitas.

Pentingnya data pribadi dalam konteks ini meningkatkan perlindungan integritas dan privasi informasi pribadi, yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kedudukan hukum seseorang. Dengan data pribadi yang transparan, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menggunakan layanan publik, menjalankan bisnis secara ekonomi, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa takut akan pembalasan dari warga negara.

Pentingnya data yang akurat dalam administrasi kependudukan tidak bisa dilebih-lebihkan. Data yang tidak akurat dapat mempengaruhi kebijakan publik dan menimbulkan permasalahan pada proses administrasi lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbaiki sistem dan prosedur untuk memastikan keakuratan data. Dengan memahami banyak faktor yang berkontribusi terhadap perubahan data, kita dapat mengatasi masalah ini dengan lebih baik dan memperbaiki sistem kependudukan administrasi di Indonesia.

Dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang turut menyebabkan perlunya perubahan data tersebut. Salah satu penyebab utama munculnya nama penulisan pada awal pendaftaran adalah seringnya disebabkan oleh faktor manusia dan kurangnya pemahaman prosedur. Selain itu, perubahan status hukum, seperti perkawinan, perceraian, dan peralihan identitas gender, mengharuskan data disajikan secara konsisten dengan keadaan setiap orang saat ini.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya data pribadi sangat menghambat proses kependudukan administratif. Orang yang tidak memahami proses pendaftaran dapat menyebabkan masalah yang sulit. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih tepat bagi kependudukan administrasi sangat penting untuk mengurangi permasalahan data.

Migrasi dan perubahan demografi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keakuratan data. Proses pengumpulan data tentang migrasi sering kali dikritik, yang mungkin akan menimbulkan masalah administratif di kemudian hari. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, sistem kependudukan administrasi di Indonesia dapat diperbaiki, menjadikan statistik lebih akurat dan sejalan dengan kenyataan masyarakat umum.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perubahan Data Diri Pada Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 176/Pdt.P/2024/PN TJK

Keperdataan seseorang akan mulai muncul begitu ia lahir, namun kepentingan hukumnya akan menimbulkan permasalahan lain (Pasal 2 KUHPperdata). Peristiwa kelahiran, termasuk salah satu peristiwa terpenting dalam Administrasi Kependudukan Undang-Undang, yang menguraikan akibat-akibat wajib yang harus dilaporkan kepada instansi terkait. Kelahiran tersebut akan dicatat dalam Daftar Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang memuat segala keterangan nama anak. Oleh karena itu, akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai dokumen identitas seseorang, oleh karena itu nama yang tercantum dalam dokumen harus sesuai dengan keterangan yang terkandung di dalamnya.

Dalam proses hukum terkait perubahan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), hakim mempunyai peranan penting dalam menyikapi beberapa aspek yang menjadi landasan dalam pengembangan keputusan. Pertimbangan utama adalah bukti autentik yang ditetapkan oleh pemohon. Bukti ini mencakup dokumen resmi seperti akta kelahiran, surat nikah, dan dokumen identitas lainnya yang menunjukkan bahwa data yang ingin diungkapkan ada. Hakim dapat menilai kesesuaian antara data di KTP dan KK dengan menggunakan bukti yang diberikan jika terdapat dokumen asli.

Selain otentik, hakim juga mempengaruhi pendapat pihak-pihak terkait. Pernyataan

tersebut dapat datang dari teman, keluarga, atau orang lain yang memahami keadaan pemohon. Dalam banyak kasus, bukti dapat memberikan konteks tambahan yang memperkuat argumen yang mendukung perubahan data. Misalnya, jika pemohon mengubah nama karena penulisannya, kesaksian terdekat dapat membantu membuktikan bahwa nama yang digunakan adalah nama yang digunakan secara konsisten sepanjang kehidupan sehari-hari.

Pertimbangan lain yang sering dibahas dalam hakim adalah dampak sosial dari keputusan yang dibahas. Hakim tidak hanya mendukung kebutuhan pemohon individu; juga mendukung kebutuhan masyarakat umum atau individu lain yang mungkin timbul dari keputusan tersebut di atas. Misalnya, dalam situasi ketika perubahan status hukum diperlukan, hakim akan menilai bagaimana perubahan tersebut dapat berdampak pada anggota keluarga lainnya.

Aspek hukum yang mendukung suatu keputusan juga menjadi pertimbangan yang krusial. Hakim harus menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan. Produk hukum ini menetapkan hak-hak warga negara dalam hal ini dan memberikan kerangka kerja untuk proses perubahan data. Dengan berpegang pada standar hukum yang relevan, hakim dapat memberikan tanggapan yang tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Faktor lain yang juga mempengaruhi keputusan adalah kebijakan kependudukan administratif yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam kasus tertentu, pengamatan Dukcapil terhadap prosedur dan indikator perubahan data dapat mempengaruhi penilaian hakim. Hakim cenderung mengikuti pedoman tersebut dalam mengambil keputusan jika ada kebijakan yang jelas dan transparan. Dengan adanya keselarasan antara keputusan pengadilan dan kebijakan

Hakim juga harus menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks perubahan data, keputusan yang dibicarakan harus mempertimbangkan prinsip keadilan bagi pemohon dan memberikan pedoman hukum kepada pihak-pihak yang mungkin terkena dampak. Dengan menyoroti aspek-aspek ini, hakim berfungsi sebagai benteng hukum dan pelindung hak-hak individu di seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, proses mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat juga dapat membantu dalam mengambil keputusan. Dalam kasus tertentu, hakim mungkin mendorong kedua belah pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan sebelum menyelesaikan perkara tersebut. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses, namun juga mengurangi konflik dan menciptakan kesepakatan yang sangat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan mempertimbangkan banyak faktor, hakim dapat membuat laporan yang lebih komprehensif dan akurat dalam proses perubahan data pribadi, yang pada akhirnya memperkuat integritas sistem administrasi Indonesia.

Proses Hukum dalam Perubahan Data Diri

Proses hukum perubahan informasi pribadi pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti oleh peserta. Langkah pertama adalah mengajukan permohonan izin ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pendukung yang relevan, seperti akta kelahiran, surat nikah, dan dokumen identitas lainnya, harus disertakan bersama dengan formulir permohonan. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi akurat dan komprehensif.

Setelah izin diberikan, Dukcapil akan memverifikasi data yang diberikan. Tujuan dari proses verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan tidak mengandung kesalahan atau inkonsistensi. Jika terdapat ketidaksesuaian, pemohon akan digunakan untuk memperbaiki atau memperluas dokumen yang diperlukan. Proses verifikasi ini sangat penting agar perubahan data dapat dilakukan dengan menggunakan cara yang sah sesuai prosedur.

Namun, jika pemohon merasa keberatan dengan keputusan Dukcapil, berhak membalut. Proses banding ini dilakukan melalui sistem hukum, dimana pemohon dapat memberikan izin kepada pengadilan. Pada tahap ini, peneliti harus mengkaji seluruh dokumen dan buku terkait yang mendukung argumen tersebut dan memberikan penjelasan yang jelas mengapa keputusan Dukcapil perlu ditulis. Proses banding menyoroti dimensi hukum yang penting dalam perubahan data dan menyediakan sarana untuk memperoleh keadilan.

Apabila terdeteksi adanya banding, maka sidang di pengadilan menjadi langkah selanjutnya. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan semua hal yang sedang dibicarakan dan mengganggu keterangan orang-orang yang hadir. Sebelum mengambil keputusan, Hakim akan mempertimbangkan segala argumen dan pertimbangannya. Proses sidang ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keprihatinan mereka. Keputusan Hakim bersifat final dan mengikat semua pihak.

Sesuai dengan keputusan hakim, pemohon akan menerima putusan yang merupakan hasil dari proses hukum yang telah selesai. Apabila keputusan mengganggu pemohon, Dukcapil wajib melakukan transformasi data sesuai dengan pengadilan keputusan. Sebaliknya jika keputusan menolak permohonan, pemohon harus menerima hasilnya dan mampu mempengaruhi sistem hukum di kemudian hari jika masih banyak ketidakadilan.

Penting untuk dicatat bahwa proses hukum dalam perubahan data tidak terbatas pada prosedur administratif. Prosedur ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh bukti identitasnya dalam bentuk dokumen yang berimplikasi pada aksesnya terhadap pelayanan publik, hak hukum, dan hak sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses hukum sangat penting bagi masyarakat umum untuk memastikan hak-hak mereka ditegakkan.

Proses hukum perubahan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) melibatkan beberapa langkah penting dan berbelit-belit. Bab ini diawali dengan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dimana pemohon harus menyertakan semua dokumen dan formulir yang diperlukan. Verifikasi data Dukcapil merupakan langkah penting dalam memastikan keakuratan informasi yang diberikan, dan surat keputusan memberikan penilaian realistik terhadap perubahan yang terjadi.

Jalur banding ke pengadilan merupakan salah satu pilihan yang tersedia di pemohon merasa keberatan teras keputusan Dukcapil. Proses sidang di pengadilan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya sekaligus menerima masukan yang akurat dari hakimnya. Keputusan pengadilan, baik yang bersifat mendukung maupun permohonan, mempunyai konsekuensi hukum yang harus diurus oleh Dukcapil.

Proses ini tidak hanya baik secara administratif, namun juga melindungi privasi orang ketika menangani data pribadi. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap proses hukum ini, masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi informasi dan identitas pribadinya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami dan mengikuti prosedur sehingga setiap perubahan pada data mereka dapat dilakukan secara adil dan sah.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mempunyai berbagai implikasi hukum yang penting, baik bagi perorangan maupun seluruh masyarakat. Salah satu implikasi yang paling penting adalah dampak terhadap identitas hukum individu. KTP dan KK merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai dokumen identitas. Setiap perubahan yang dilakukan harus didokumentasikan secara cermat dalam dokumen-dokumen ini untuk menghindari konflik atau keretakan di kemudian hari. Ketidakakuratan statistik dapat dikaitkan dengan sulitnya mengakses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan

Selain itu, perubahan data juga mempengaruhi status pemohon hukum. Misalnya, jika seseorang mengubah status hukumnya dari lajang menjadi menikah, maka hal tersebut dapat

mempengaruhi hak-hak hukum yang ada, seperti hak untuk membela diri dan hak untuk ikut serta dalam proses hukum lainnya. Oleh karena itu, hal ini penting bagi setiap individu.

Dalam konteks kependudukan administratif, perubahan data pribadi juga mempengaruhi sistem pemasukan dan penghapusan data di tingkat tertinggi pemerintahan. Data yang tidak akurat dapat menimbulkan permasalahan dalam analisis data yang berkaitan dengan kependudukan, yang dapat mempengaruhi kebijakan dan perencanaan publik. Pemerintah memerlukan statistik yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang tepat di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sosial.

Proses perubahan data yang tidak transparan juga dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti praktik korupsi atau penggunaan izin. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menerapkan prosedur yang jelas dan transparan dalam analisis data. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Misalnya, perubahan data juga mempunyai implikasi terhadap hubungan sosial pemohon. Data yang tidak dapat diandalkan dapat menimbulkan stigma atau diskriminasi di masyarakat. Misalnya, orang yang mengubah identitas gendernya dapat mengalami konsekuensi sosial yang signifikan jika data pada dokumen asli tidak bertentangan dengan identitas mereka yang disebutkan dengan jelas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat umum untuk memahami dan mendukung keberagaman identitas yang ada.

Hak-hak sipil yang dimiliki individu juga menjadi pertimbangan penting dalam konteks perubahan data. Dalam banyak kasus, masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap datanya mungkin dapat memperolehnya dari berbagai layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu, apa pun latar belakang mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan melindungi informasi pribadi mereka.

Pada akhirnya, perubahan data harus dipandang sebagai komponen upaya mengembangkan sistem administrasi yang lebih inklusif dan responsif. Memahami implikasi hukum dari perubahan data pribadi memungkinkan semua pihak, baik individu maupun pemerintah, untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem administrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan adil. Hal ini akan menjadikan masyarakat lebih inklusif dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kebutuhan setiap individu.

Implikasi hukum dari perubahan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mencakup berbagai hal yang berdampak baik pada individu maupun masyarakat. Data yang akurat sangat penting untuk memastikan identitas hukum individu, yang mempengaruhi aksesibilitas layanan publik dan perlindungan hukum. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan penting, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, dan juga dapat menimbulkan konflik hukum terkait status individu.

Selain itu, proses transformasi dan persetujuan data sangat penting untuk mencegah korupsi dan penggunaan wewenang dalam tugas-tugas administratif. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perubahan data diri yang akurat juga dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap individu, terutama yang mengalami perubahan identitas.

Selanjutnya, perhatian pemerintah untuk memberikan akses akurat kepada seluruh individu dalam proses perubahan data sangat penting untuk mengidentifikasi marginalisasi kelompok terkait. Oleh karena itu, perubahan data harus dilihat sebagai upaya kolektif untuk mengembangkan sistem administrasi yang lebih inklusif dan bertanggung jawab yang pada akhirnya akan memperkuat hak-hak individu dalam masyarakat.

SIMPULAN

Dari pembahasan ini dapat dilihat bahwa setiap perubahan terhadap dokumen asli, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), mempunyai implikasi hukum yang signifikan. Dalam analisisnya, hakim mempertimbangkan keakuratan dan keabsahan fakta yang dipandang sebagai faktor krusial dalam menentukan kedudukan hukum seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa informasi pribadi yang dapat diandalkan tidak hanya penting untuk identifikasi tetapi juga untuk melindungi hak-hak hukum seseorang dalam masyarakat.

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa pendirian hakim dalam perkara ini didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum. Pengolahan data yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengikuti prosedur yang jelas dan transparan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi instansi pemerintah untuk menjaga integritas dan keakuratan penyimpanan data, untuk mencegah potensi konflik.

Terakhir, artikel ini menjelaskan bahwa data yang baik tidak hanya terbatas pada aspek hukum saja, namun juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Diyakini bahwa memiliki sistem yang efisien untuk menganalisis dan mentransfer data pribadi akan menghasilkan lingkungan yang lebih aman dan transparan di mana hak-hak masyarakat dihormati

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga atas doa dan dukungannya, dosen pembimbing atas ilmu dan arahnya, serta rekan-rekan yang telah memberikan semangat selama proses penyusunan jurnal ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, sehingga dengan rendah hati menerima kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif bagi keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, L. (2021). "Kesalahan Pendaftaran Data Pribadi dan Dampaknya di Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 15-30.
- Cahyani, S. (2022). "Dampak Migrasi terhadap Perubahan Data Kependudukan". *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, 6(1), 45-59.
- Haryanto, M. (2020). "Prinsip Keadilan dalam Proses Hukum Perubahan Data Diri". *Jurnal Hukum dan Etika*, 11(1), 90-102.
- Hidayat, R. (2022). "Hak Sipil dan Akses terhadap Perubahan Data Pribadi". *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 5(3), 90-105.
- Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(1), 122-130.
- Kurniawan, A. (2023). "Prosedur Pengajuan Perubahan Data Pribadi di Dinas Kependudukan". *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 50-62.
- Lestari, P. (2020). "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan dalam Perubahan Data Diri". *Jurnal Hukum dan Etika*, 9(4), 201-213.
- Mahuli, J. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(4), 188-194.
- Nugroho, E. (2021). "Analisis Hukum Perubahan Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(4), 201-215.
- Prabowo, E. (2023). "Identitas Gender dan Perubahan Data Pribadi dalam Sistem Administrasi Negara". *Jurnal Gender dan Hukum*, 4(2), 91-105.
- Pramudito, R. (2020). "Kesaksian dalam Proses Perubahan Data Diri: Studi Kasus di Pengadilan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 78-89.

- Prasetyo, B. (2023). "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan dalam Perubahan Data Diri". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(2), 102-115.
- Prasetyawati, S. E., Ramadan, S., & Pratiwi, G. (2024). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kegiatan Transaksi Pemindah-Tanganan Objek Sengketa Jual Beli Tanah Yang Diatasnya Masih Melekat Sita Eksekusi Sertifikat Hak Guna Bangunan Secara Sepihak.(Studi Putusan Nomor 182/Pdt. G/2022/Pn. Tjk). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 517-525.
- Prasetyawati, S. E., Ramadan, S., & Ramadhan, S. (2024). Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putus Nomor 338/PID. SUS/2022/PN Kla). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 664-674.
- Raharjo, T. (2021). "Kasus Hukum Perubahan Nama dan Implikasinya terhadap Identitas Warga Negara". *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 201-215.
- Ramadan, F., Prasetyawati, S. E., & Ramadhan, S. (2024). Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putus Nomor 338/PID. SUS/2022/PN Kla). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 664-674.
- Ramasari, R. D., Wayka, G. A., & Gumilang, M. A. R. (2023). LIABILITY FOR THE CRIMINAL ACT OF RAPE ON A MINOR BY DECEPTION BASED ON JUDGMENT NO. 11/PID. SUS ANAK/2022/PN TJK. *Jurnal Al-Dustur*,
- Santoso, H. (2023). "Perbaikan Sistem Administrasi Kependudukan untuk Meningkatkan Akurasi Data". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(2), 33-47.
- Sari, D. (2021). "Peran Bukti Otentik dalam Proses Hukum Perubahan Data Pribadi". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 45-60.
- Setiawan, B. (2023). "Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Implikasinya terhadap Putusan Pengadilan". *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 134-145.
- Sumarni, T. (2022). "Verifikasi Data dalam Proses Perubahan KTP dan KK". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 145-158.
- Supriyadi, M. (2020). "Pentingnya Keakuratan Data Kependudukan dalam Sistem Administrasi Negara". *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 123-135.
- Wibowo, Y. (2020). "Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Data Kependudukan yang Akurat". *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, 5(3), 150-165.
- Widiastuti, R. (2020). "Pendidikan Kependudukan: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat". *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 5(2), 78-89.
- Wulandari, A. (2022). "Dampak Sosial dari Perubahan Data Diri dalam Administrasi Kependudukan". *Jurnal Sosial dan Politik*, 5(3), 112-125.
- Rahman, F. (2021). "Evaluasi Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(4), 150-162.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Data Kependudukan.